

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya bencana wabah virus *corona* yang terjadi pada tahun 2019 atau lebih sering disebut *covid-19*, wabah ini menyebar dengan cepat hingga menyebabkan angka kematian melonjak tinggi. Melihat situasi tersebut, pemerintah membuat kebijakan yang membatasi interaksi sosial, lebih tepatnya pembatasan sosial atau bahkan *lockdown*, hal ini mengakibatkan perekonomian menjadi melemah pun berhenti. Wabah ini menerjang Indonesia dan berdampak pada perekonomian.

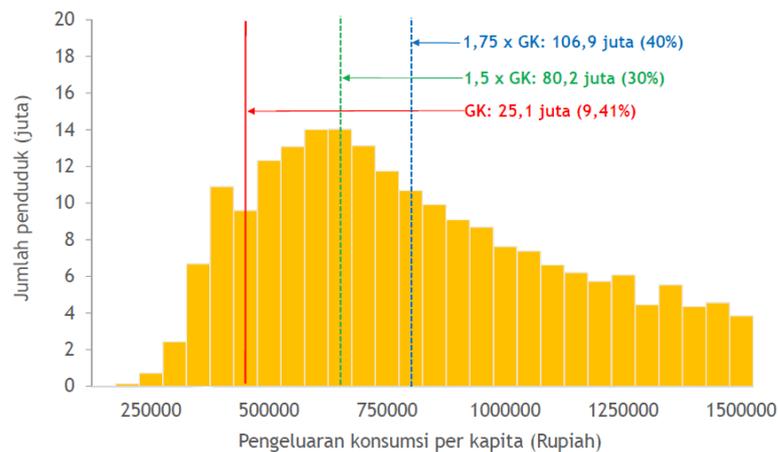
Dalam memenuhi hak-hak para pekerja saat itu memang sedang menghadapi penghambatan yang disebabkan oleh pandemi, pemerintah juga telah menyampaikan apabila keadaan ini dianggap sebagai keadaan darurat. Akibatnya dapat mendorong terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan terus-menerus, Pemutusan Hak Kerja (PHK) nyaris dialami pada semua cakupan perusahaan, seperti halnya; pada pariwisata, perdagangan, transportasi, kegiatan pembangunan dan daya tahan ekonomi pada bagian informal mulai menurun, terutama yang menggantungkan gaji harian (Putri 2021).

Melihat situasinya, banyak perusahaan yang mengalami keterpurukan sehingga menyebabkan kerugian, hal ini dikarenakan sistem pada perusahaan

yang terganggu hingga mempengaruhi seluruh sistem sampai pada pemasukan yang diperoleh perusahaan. Kebijakan pemerintah untuk melakukan bekerja dari rumah dan jarak sosial mengakibatkan kerugian pada perusahaan.

Berdasarkan data jumlah masyarakat rentan miskin, wabah ini dapat mengakibatkan melonjaknya penduduk miskin yang mencapai 106,9 juta penduduk.

Gambar 1. 1 Data Masyarakat Rentan Miskin



Sumber : Susenas Maret 2019, diolah TNP2K

Lebih jelasnya, menemukan sekitar 82 juta penduduk Indonesia atau 30 persen dari total penduduk Indonesia (TNP2K, 2020). Diperkirakan, perkembangan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan kurang lebih 2,1 persen, dan juga mengalami keterlambatan sebesar -3,5 persen (World Bank 2020). Permasalahan ini sebagai peringatan untuk pemerintah supaya dengan cepat menyusun strategi untuk menyelamatkan sektor perusahaan yang terkena imbasnya, serta bagi masyarakat yang mengalami penurunan ekonomi akibat dari wabah ini. .

Angka pengangguran melonjak tinggi dan berdampak pada perekonomian Indonesia akibat dari wabah *corona*, pemerintah membuat kebijakan agar masyarakat menerapkan sistem *social distancing* yang juga menjadi penyebabnya. Pemerintah meriliskan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 mengenai pembatasan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang memiliki tujuan untuk mengurangi angka penyebaran wabah ini. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan apabila angka pengangguran akan meningkat sampai 9,35 juta orang (Rosad, 2020).

Menurut penyampaian pada statistik No. 86/11/Th.XXIII, 5 November 2020 bahwa 29,12 juta orang terdampak dari wabah hingga 14,28 persen, melonjaknya angka pengangguran sejak Agustus 2020 memasuki 7,07 persen yang berarti 2,56 juta orang tidak memiliki pekerjaan akibat dari bencana wabah ini (Rizki 2021).

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya pemerintah untuk menangani terjadinya banjir PHK. Dalam jurnal yang disusun oleh Wijayanti and Humardhiana (2020) Program Kartu Prakerja sebagai salah satu solusinya, penerima manfaat mendapatkan biaya pelatihan dari pemerintah, dengan syarat identitas sesuai dengan pemegang kartu tersebut, ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensinya. Menurut Ningrum et al. (2022) Program Kartu Prakerja yang disahkan dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 difungsikan sebagai wadah mengembangkan kapabilitas kerja melalui program Kartu Prakerja, pengembangan kompetensi ini berupa dana insentif atau bantuan biaya.

Menurut Ningrum et al. (2022) masyarakat yang berhasil mendaftar pada program Kartu Prakerja ini akan melaksanakan beberapa sesi pelatihan online yang dapat diakses untuk *self-improvement*, pun dapat disesuaikan dengan minat atau keahlian yang dimiliki. Sistem pelaksanaan program ini menggunakan sistem digitalisasi secara keseluruhan, maka dari itu sangat diharapkan akan memenuhi kualitas SDM yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat mengatasi permasalahan tenaga kerja di Indonesia (Memah et al. 2022).

Kartu Prakerja memang sudah seharusnya menjadi jembatan bagi masyarakat untuk meningkatkan skill dan pengetahuannya. Hal itu dapat dilakukan dengan melewati jenis-jenis pelatihan keterampilan. Tidak hanya itu, menciptakan masyarakat yang kompeten dan memiliki daya yang kuat guna meminimalisir sifat bergantung berlebih kepada orang lain adalah tujuan dari pada pemerintah. Pemberian fasilitas yang ada untuk mengakses jenis-jenis bidang pelatihan, dan juga bantuan dana atau disebut dana insentif yang difasilitasi oleh program Kartu Prakerja.

Informasi yang disampaikan pada Pers Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2021, Kartu Prakerja sebagai pendorong kebhkerjaan melalui untuk *skilling*, *reskilling* dan *upskilling*. Namun, dalam program ini tidak ada jaminan untuk mendapat pekerjaan di suatu perusahaan ataupun berhasil dalam membangun suatu usaha karena itu tergantung dari masing-masing individu tentang bagaimana menerapkannya.

Walaupun memiliki tujuan yang membangun, adanya program Kartu Prakerja ini juga menimbulkan masalah-masalah baru di kalangan masyarakat. Menurut hasil penelitian Fadillah (2022) mengemukakan bahwa hasil temuannya menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Kartu Prakerja periode gelombang pendaftaran tahun 2020 belum berjalan dengan baik.

Adapun hasil penelitian Ningrum et al (2022) yang dilakukan di Kota Semarang menunjukkan bahwa implementasi program Kartu Prakerja dinilai telah bekerja dengan baik. Hal itu dapat dikatakan karena menurut penelitian yang telah dilakukan, program Kartu Prakerja ini juga terbukti mampu membantu penerima manfaat pada upaya menciptakan kompetensi yang unggul serta menstabilkan perekonomian penerima manfaat dari pada kartu prakerja.

Seperti yang disampaikan, Kartu Prakerja ini memperoleh tanggapan yang baik dari warga negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari total keseluruhan pendaftar kini mencapai 15,9 juta pendaftar. Ditinjau sejak enam gelombang pendaftaran, total penerima Kartu Prakerja sebanyak 3 juta penerima. Sebanyak 849.921 penerimanya sudah menuntaskan pelatihan pertamanya, dan sebanyak 610.563 penerima sudah menerima dana bantuannya.

Seiring berjalannya waktu hingga berjalan lima bulan, survei menyatakan bahwa penilaian yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 2020 pada 450.000 penerima Kartu Prakerja ini apabila ditarik kesimpulan dari sudut pandang penerima manfaat memang sesuai sasaran dengan presentase 90% pendaftar

tidak sedang bekerja. Selain itu juga terdiri dari pekerja informal dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Sedangkan dari segi pelatihan, persentase menunjukkan bahwa 85% penerima ini mengatakan apabila pelatihan yang diikuti mampu meningkatkan kompetensi per individual baik itu *skilling, reskilling, atau upskilling*.

Tidak hanya itu, pemilik akun kartu prakerja belum tentu akan memperoleh pekerjaan, atau lebih tepatnya Program Kartu Prakerja ini tidak memberikan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Kartu prakerja ini dibuat dengan tujuan agar mampu *improve* kompetensi kerja. Seperti yang sudah dipaparkan, Kartu Prakerja adalah suatu program yang dirancang guna mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) dengan kompetisi kerja dan kewirausahaan,

Di wilayah Kabupaten Pasuruan, lebih tepatnya di Kecamatan Sukorejo banyak masyarakat setempat yang terkena PHK besar-besaran karena penduduk disini mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik, selain itu juga beberapa *home industry* tidak dioperasikan karena adanya wabah *covid-19* ini. Maka, masyarakat yang mengetahui adanya kehadiran Program Kartu Prakerja ini sangat antusias dalam mengikuti pendaftaran yang diakses melalui aplikasi.

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang sudah terjabarkan, akan sangat penting agar dilakukannya penelitian yang membahas bagaimana Dampak Program Kartu Prakerja Pada Masyarakat Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak Program Kartu Prakerja Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna menganalisis, mengetahui, serta menjelaskan dampak dari Program Kartu Prakerja Bagi Masyarakat Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan masukan akademisi khususnya bagi mahasiswa prodi Kesejahteraan Sosial mengenai program pemerintah Kartu Prakerja.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan, sehingga dapat menjadi informasi dan referensi mengenai pembahasan Dampak Program Kartu Prakerja.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Didalam suatu penelitian ini diperlukan pembatasan agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas cakupannya sehingga memiliki fokus pada penelitiannya. Ruang lingkup yang akan diteliti, yakni :

- Program Kartu Prakerja

- Dampak Program Kartu Prakerja

- Kesejahteraan Masyarakat

